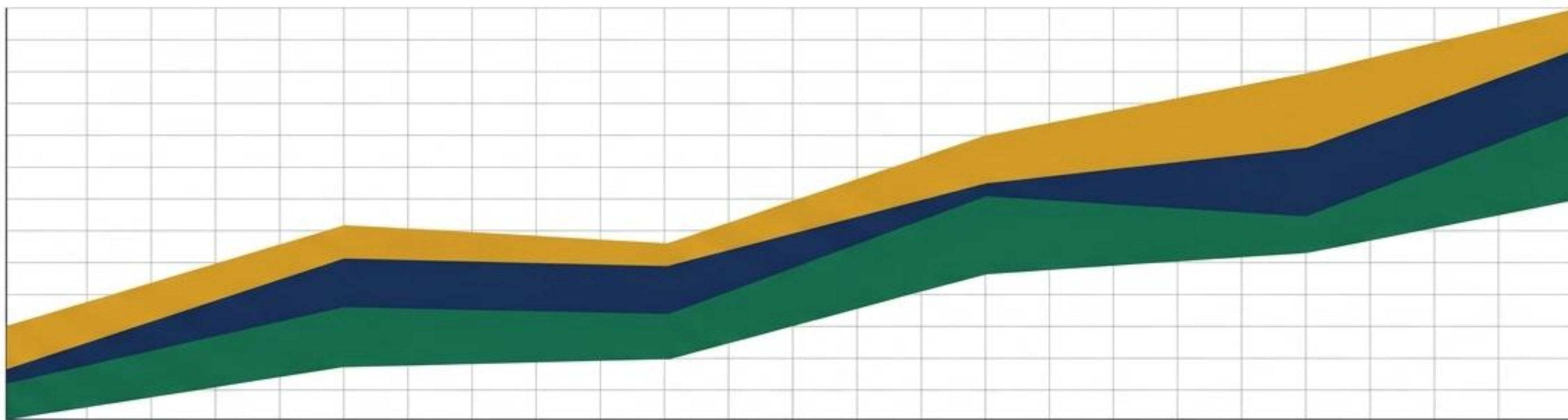




Rapor Tengah Tahun: Postur APBD 2026

Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Kota Bogor, Kota Bandung,
dan Kab. Bandung (Data SIKD Kemenkeu, Per 8 Juni 2026)

Kota Bandung

Si Raksasa Mandiri



Pagu Terbesar (Rp 7,61 Triliun),
PAD dominan, namun serapan
belanja berjalan lambat (24,44%).

Kab. Bandung

Si Pelari Cepat



Mengandalkan transfer pusat,
namun memimpin jauh dalam
kecepatan eksekusi paruh waktu
(Realisasi Belanja 33,28%).

Kota Bogor

Si Mungil yang Tertahan



Anggaran terkecil (Rp 3,18 Triliun),
dengan kendala kritis pada
serapan infrastruktur dasar
(Belanja Modal hanya 4,14%).

Skala anggaran tidak berbanding lurus dengan kelincahan birokrasi dalam mengeksekusi program di Semester I.

Peta Skala Anggaran: Perbandingan Daya Tembak Finansial

Skala ekonomi

Kota Bandung mendominasi,
memiliki kapasitas fiskal
lebih dari dua kali lipat
dibandingkan Kota Bogor.
Namun, apakah besaran ini
linier dengan kecepatan
serapan?

KOTA BANDUNG
**Rp 7.610,22
Miliar**

KAB. BANDUNG
**Rp 6.375,65
Miliar**

KOTA BOGOR
**Rp 3.183,97
Miliar**

Kecepatan Serapan: Lomba Menuju Pertengahan Tahun

Target Ideal Paruh Tahun (~50%)



Kabupaten Bandung membuktikan bahwa eksekusi anggaran **yang lincah** sangat **mungkin** dicapai pada bulan Juni, meninggalkan kedua kota yang masih tertahan di kisaran 21-24%.

Anatomi Pendapatan: Kemandirian Fiskal vs Ketergantungan Pusat

KOTA BANDUNG: Dominasi PAD (Mandiri)

PAD: Rp 4.346,19 M

TKDD: Rp 2.370,64 M

KOTA BOGOR: Mayoritas PAD (Mandiri)

PAD: Rp 1.788,71 M

TKDD: Rp 1.128,35 M

KAB. BANDUNG: Dominasi TKDD (Ketergantungan Tinggi)

PAD: Rp 2.019,57 M

TKDD: Rp 3.763,69 M

Ironi kapasitas: Kab. Bandung mengeksekusi anggaran paling cepat, namun secara struktural paling bergantung pada injeksi dana dari Pemerintah Pusat dibandingkan wilayah kota.

Kinerja Pungutan Daerah: Realisasi Pajak & Retribusi



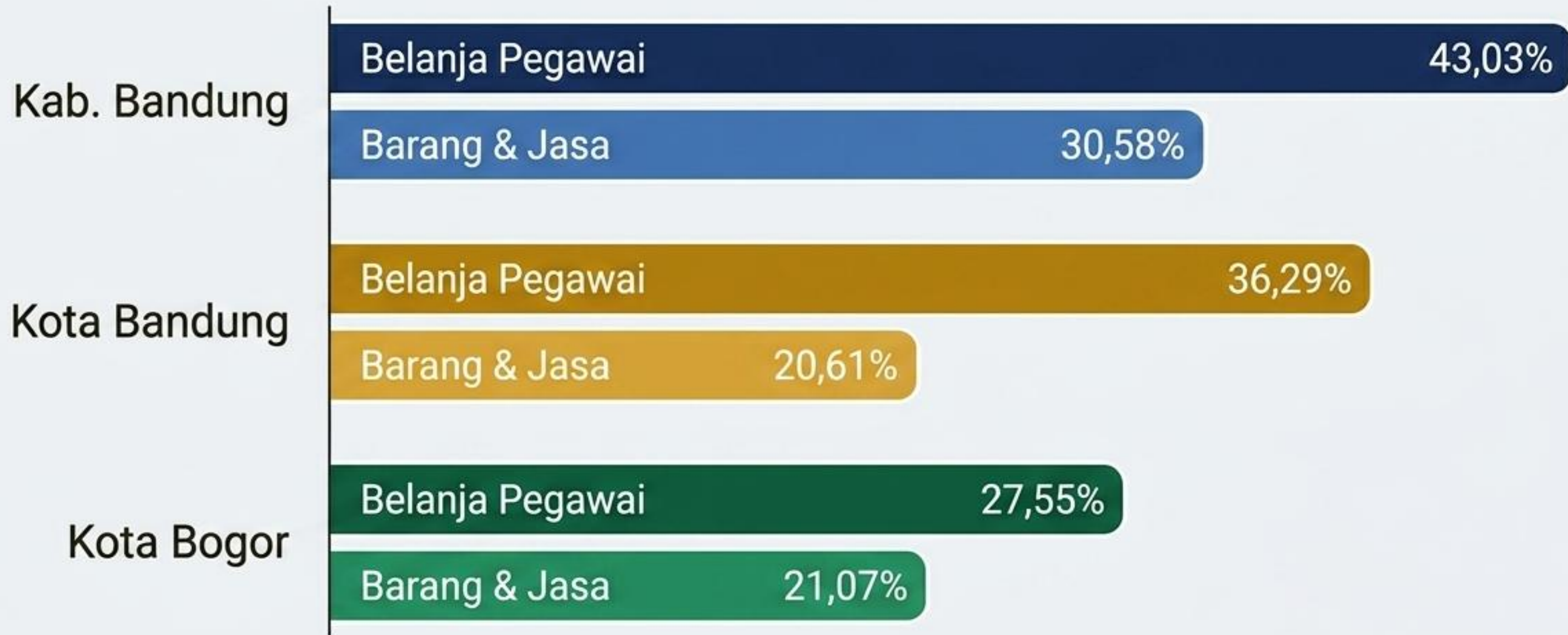
Mesin penagihan Kabupaten Bandung terbukti paling efisien di Semester 1. Kota Bogor dan Kota Bandung masih harus mempercepat akselerasi pungutan untuk memenuhi target akhir tahun.

Postur Belanja: Prioritas Alokasi Anggaran 2026



Struktur pengeluaran ketiga wilayah didominasi oleh Belanja Barang & Jasa serta Belanja Pegawai. Alokasi Belanja Modal (infrastruktur/aset publik) dialokasikan dalam proporsi yang jauh lebih kecil.

“Burn Rate” Operasional: Birokrasi yang Terus Berjalan



Belanja Pegawai menjadi komponen paling lancar yang diserap di seluruh wilayah.
Mesin birokrasi bergerak cepat untuk operasional internalnya sendiri.

⚠️ Lampu Merah: Mandeknya Belanja Modal (Infrastruktur)



Kab. Bandung 21,44%

(Rp 155,61 M dari Rp 725,82 M) – Berjalan lambat.

Kota Bogor 4,14%

(Rp 13,65 M dari Rp 329,99 M) – Kritis.

Kota Bandung 1,92%

(Rp 15,28 M dari Rp 796,40 M) – Nyaris lumpuh.

Hambatan struktural dalam proses pengadaan dan tender di awal tahun menyebabkan pembangunan infrastruktur dan aset publik di Kota Bogor dan Kota Bandung praktis belum dimulai hingga bulan Juni.

Dinamika Pembiayaan: Pemanfaatan Sisa Anggaran (SiLPA)



Kabupaten Bandung kembali menunjukkan agresivitas dengan memutar kembali sisa anggaran tahun lalu secara cepat, sementara dana SiLPA Kota Bandung masih tertahan sepenuhnya.

Sintesis: Matriks Skala vs. Kecepatan Eksekusi



Besarnya skala anggaran tidak menjamin kecepatan eksekusi. Agilitas institusional dan efisiensi lelang memegang peranan lebih krusial daripada sekadar ukuran dompet daerah.

Diagnostic Scorecard: Rapor Tengah Tahun SIKD

Wilayah	Kapasitas Anggaran (Skala)	Kemandirian Fiskal (Rasio PAD)	Akselerasi Serapan (Total Realisasi)	Kinerja Infrastruktur (Belanja Modal)
 Kota Bandung	Rp 7,6 T (Tinggi)	 Dominan PAD	 24,4%	 1,9%
 Kab. Bandung	Rp 6,3 T (Menengah)	 Dominan TKDD	 33,2%	 21,4%
 Kota Bogor	Rp 3,1 T (Rendah)	 Mayoritas PAD	 21,6%	 4,1%

Rangkuman postur APBD menunjukkan tidak ada wilayah yang unggul di semua lini. Tantangan eksekusi infrastruktur menjadi benang merah kelemahan di Jawa Barat bagian barat.

Kesimpulan & Rekomendasi Strategis

1 Akselerasi Tender (Darurat Infrastruktur)

Kota Bandung dan Kota Bogor harus segera menerapkan langkah diskresi atau percepatan lelang proyek pada pada Kuartal III untuk membuka blokir (*unblock*) Belanja Modal yang nyaris stagnan.

2 Optimalisasi Kapasitas PAD

Meski menjadi yang tercepat dalam realisasi pengeluaran, Kab. Bandung perlu mentransformasi basis Pajak dan Retribusinya untuk mengurangi ketergantungan struktural pada transfer pusat (TKDD).

3 Evaluasi Paruh Waktu

Terdapat defisit serapan rata-rata sebesar 20-30% dari target ideal paruh tahun (50%). Seluruh wilayah wajib meninjau ulang kurva penyerapan agar tidak terjadi penumpukan anggaran (*bottleneck*) yang ekstrem di bulan Desember 2026.